OMBUDSMAN JATENG TEGASKAN TUNJANGAN PENYULUH KB KUDUS CAIR BULAN INI

Kamis, 06 Desember 2018 - Indra

Ombudsman Jawa Tengah menegaskan para penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kudus dapat bernafas lega setelah adanya keputusan terkait status mereka dan mendapat tunjangan layaknya aparatur sipil negara (ASN).

"Tunjangan akan segera mencair bagi penyuluh KB karena sudah ada landasan hukumnya. Kami juga sudah berkonsultasi dengan BPK Jateng yang menyatakan tidak ada kesalahan administrasi," kata Asisten Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu, Rabu (5/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, persoalan tuntutan tunjangan oleh para penyuluh KB di Kudus akan segera terlunasi sebelum tutup anggaran 2018. "Bulan Desember ini akan cair, tadi Bupati sudah menyepakati," imbuhnya.

Ia menjelaskan, tunjangan yang dicairkan ada sekitar Rp600 juta yang diambilkan dari APBD kabupaten Kudus. Tunjangan tersebut akan dicairkan untuk 37 penyuluh KB yang selama setahun tidak mendapatkan tunjangan karena ketidakjelasan status mereka.

Polemik ini bermula saat Pemkab Kudus mulai melimpahkan tanggung jawab 37 penyuluh KB yang sebelumnya pegawai daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pasca adanya SOTK baru. Namun perihal gaji dan tunjangan mereka masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sampai 2017 berakhir. Sehingga para penyuluh KB tersebut melaporkan nasib mereka ke Ombudsman Jateng.